

# PERENCANAAN SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

**Letty Adelina**

Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya  
Km. 12,5 Simpang Baru Panan, Pekanbaru 28293

**Abstract: Data Collection and Reporting System Planning Development Activities.** The purpose of this study is to identify and analyze the data collection and reporting system planning development activities in the administration and development of electronic data Pekanbaru City Secretariat as well as factors that hinder the planning system-based data collection and reporting applications. This study used descriptive qualitative approach. The informants are sections and sub sections finance program and project implementation related SKPD. The technique of collecting data through interviews, observation and document engineering. Analysis of data through data reduction, data presentation, verification and conclusion. Based on the results of research, planning data collection and reporting system is divided into four stages, namely planning, establishment plan, control plans and evaluating the implementation of the plan. While the factors that hinder the planning of this system is the absence of regulation, weak human resources, lack of effective supervision, lack of commitment, the effects of mutations and the problem period.

**Keywords:** planning, development activities, data collection, reporting

**Abstrak: Perencanaan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan di bagian administrasi pembangunan dan data elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menghambat perencanaan sistem pendataan dan pelaporan yang berbasis aplikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian adalah bagian dan sub bagian program keuangan pelaksanaan proyek dan SKPD terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan teknik dokumen. Analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan sistem pendataan dan pelaporan dibagi menjadi empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Sementara faktor-faktor yang menghambat dalam perencanaan sistem ini yaitu ketiadaan peraturan, lemahnya SDM, pengawasan yang kurang efektif, kurangnya komitmen, efek mutasi dan masalah jangka waktu.

**Kata kunci:** perencanaan, kegiatan pembangunan, pendataan, pelaporan

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan aspirasi masyarakat. Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus sesuai keinginan dan kebutuhan daerah, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangannya yang dititik beratkan pada kepentingan publik, bukan saja dilihat seberapa besar pengalokasian anggaran tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurut Siagian (1994), pembangunan memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Selanjutnya Siagian juga menjelaskan bahwa pembangunan sebagai

kasian anggaran tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurut Siagian (1994), pembangunan memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Selanjutnya Siagian juga menjelaskan bahwa pembangunan sebagai

suatu perubahan dimaksudkan kondisi bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, dan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan suatu kelompok untuk terus berkembang.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip *good government* dan *clean government*. Pemerintah daerah dalam kedudukannya sebagai pelayan publik diharapkan mampu secara total menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Konsep *good government* dan *clean government* adalah sebuah konsensus yang ingin dicapai pemerintah dan telah mengalami transformasi semenjak tuntutan pola pemerintahan yang yang efektif, efisien, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab berkembang ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan konsep tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan *e-government* dalam perbaikan kinerja dan pelayanan organisasi publik yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik merupakan unsur perangkat daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok sekretariat daerah, bahwa Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik memiliki rincian tugas dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan seluruh bidang program, evaluasi pengendalian dan pelaporan serta pengolahan data elektronik. Selain itu, Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik bertugas juga dalam memfasilitasi penyusunan program kerja, evaluasi, pelaporan, pengumpulan bahan, melakukan analisa pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pendataan

dan pelaporan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan informasi yang tersaji tidak cepat dan tepat. Umumnya permasalahan yang terjadi adalah tidak disiplinnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengiriman laporan dan ketidaksesuaian kondisi dilapangan dengan laporan tertulis, penggunaan sistem pendataan dan pelaporan dengan pembuatan aplikasi menjadi usulan yang layak untuk dipertimbangkan.

Perencanaan (*planning*) ditinjau dari segi sistem menurut Chadwick (1978) merupakan suatu proses yang bertingkat yang dapat mengontrol suatu susunan kegiatan, dimana urutan proses pekerjaan harus dilakukan. Roberts (1984) mendefinisikan *planning* sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan, Todaro (1986), perencanaan merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan dan faktor-faktor yang menghambat perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai objek penelitian. Dengan demikian temuan-temuan dalam penelitian dapat diinterpretasikan yang akan menghasilkan suatu kesimpulan dan putusan. Sementara itu, dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana fenomena yang

terjadi secara mendalam tentang pelaksanaan perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Karena sifat penelitian deskriptif, sehingga penyajian data ataupun informasi lebih kepada penjelasan yang terperinci yang didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan teknik dokumen.

## **HASIL**

### **Penyusunan Rencana**

Penyusunan Tujuan perencanaan sistem: yaitu memberikan kemudahan dalam pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan melalui Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Penyusunan instrumen yang diperlukan dalam sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Instrumen tersebut terkait informasi-informasi apa saja yang diperlukan SKPD dalam memuat laporan. Sebagai contoh untuk laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan, maka informasi yang diperlukan seperti nama kegiatan, nilai kegiatan, target yang telah ditentukan diawal perencanaan baik target fisik maupun keuangan, kemudian angka realisasi fisik maupun keuangannya. Penetapan instrumen dalam pelaporan diharapkan akan menjadi standar pelaporan dengan format yang telah disepakati. Sehingga format baku tersebutlah yang akan dijadikan format pelaporan dalam aplikasi.

### **Penetapan Rencana**

Penetapan rencana berkaitan dengan waktu yang diperlukan dalam realisasi sistem yang akan digunakan dalam pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Dalam penetapan rencana juga terdapat jadwal yang berisikan jadwal proses-proses perencanaan dan estimasi waktunya. Selain itu, dalam tahapan ini putusan terhadap format pelaporan sudah dilakukan. Sehingga format ini yang akan diseragamkan dan digunakan dalam sistem aplikasi.

### **Pengendalian Rencana**

Pengendalian perencanaan adalah bagaimana Bagian Administrasi Pembangunan dan Data elektronik melakukan audit dalam perencanaan tersebut. Aktifitas pengendalian tersebut mulai dari tahapan pemahaman, pengujian pengendalian dan pengujian terinci. Pengendalian yang dilakukan dapat berupa sejauh mana persiapan yang telah berjalan, langkah-langkah yang diambil bila ditemukannya hambatan. Termasuk juga didalamnya pengendalian terhadap pencegahan kesalahan dengan mengambil alternatif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan dalam proses perencanaan sistem.

### **Evaluasi Pelaksanaan Rencana**

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang subyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dikhususkan pada sistem pendataan dan pelaporan tersebut, apakah sudah siap untuk diimplementasikan guna perbaikan dalam proses pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang masih bersifat manual kepada pemanfaatan sistem.

Adanya empat tahapan tersebut digunakan sebagai acuan langkah yang sistematis dalam proses perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Selain untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi khususnya untuk Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik, tahapan perencanaan ini juga menjadi koreksi atau identifikasi dini terhadap hambatan yang timbul.

### **Faktor-faktor Penghambat**

#### *Ketiadaan Peraturan*

Keberadaan Peraturan Daerah dalam bentuk Perwako tentang pelaporan kegiatan pembangunan dimaksudkan untuk lebih memberi arah kepada seluruh instansi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengendalian intern terkait tanggung jawab dan kewajibannya memberikan laporan yang sebenarnya dan bukan hanya sebagai dokumen tertulis saja. Perwako yang dimaksud juga dapat berisi juklak dan juknis dalam pendataan dan penyampaian laporan kegiatan pembangunan dan konsekuensi hukum yang diberikan bila pendataan dan pelaporan tidak sesuai aturan yang ada.

#### *Pengawasan belum Efektif*

Kepala Satuan Kerja (Satker) diminta aktif untuk terus mengawal jalannya kegiatan pembangunan dan harus tahu kegiatan yang sedang berjalan di satkernya masing-masing. Kontrol awal diberikan oleh Kepala Satker dengan memberi arahan dan perbaikan bukan sekedar membubuhkan tandatangan tanpa mengetahui kondisi kegiatan yang berjalan.

#### *Kurangnya Komitmen.*

Di dalam tingkatan manajemen, manajemen puncak memiliki kebijakan yang luas dalam pengambilan keputusan. Komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal bagi organisasi mencapai tujuannya. Terkait dengan pelaksanaan pelaporan kegiatan pembangunan, dibutuhkan komitmen seluruh aparatur pemerintah, mulai dari pimpinan, pegawai, dan lembaga pengawas agar pelaporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan dapat memberikan keyakinan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### *Sumber Daya Manusia yang lemah*

Permasalahan SDM yang dihadapi Satker di Pemerintah Kota Pekanbaru bukan hanya pada ketersediannya saja, namun

juga kualitasnya. Bagaimanapun bagus sebuah sistem memang tidak akan berjalan maksimal ketika orang-orang yang menjalankannya tidak memiliki pengetahuan/penguasaan terhadap IT.

#### *Adanya mutasi jabatan*

Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan pegawai, karena tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Mutasi pegawai sangat lumrah terjadi setiap pergantian kepala daerah. Pejabat baru memiliki program-program unggulan yang ingin diimplementasikan, sehingga program-program terdahulu yang telah direncanakan ditunda pelaksanaannya atau tidak menjadi prioritas utama.

#### *Jangka Waktu*

Adanya perubahan dalam pelaporan kegiatan pembangunan yang semula dengan sistem yang manual kemudian digantikan dengan sistem informasi aplikasi dan maka akan membutuhkan waktu dalam implementasinya. Perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap tentunya membutuhkan kesiapan baik bagi Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik maupun seluruh Satker di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru agar sistem aplikasi *online* dapat terimplementasi secara menyeluruh.

### **PEMBAHASAN**

Perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan dilakukan dengan melalui tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi rencana. Diantara tahapan tersebut, penyusunan rencana merupakan tumpuan bagi keberhasilan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis aplikasi online. Untuk itu bagian administrasi pembangunan dan data elektronik perlu memperhatikan sumber daya yang dimiliki sebagai penunjang perencanaan sistem. Menurut Robert (1984) Perencanaan adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya

untuk kemaslahatan manusia baik jangka pendek, maka kebutuhan yang sangat penting dan harus diperhatikan bagian administrasi pembangunan dan data elektronik yaitu: sumber daya manusia.

### **Sumber Daya Manusia**

Manusia (*human*) sebagai sumber daya yang bertugas untuk menjalankan aplikasi sistem pendataan dan penyajian laporan kegiatan pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik memiliki jumlah pegawai 19 (sembilan belas) orang, yang dapat diberikan peran *controlling* terhadap laporan yang telah dikirim SKPD sebagai pengguna. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, penguasaan terhadap sistem ini wajib dimiliki khususnya bagi pegawai Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik. Penguatan terhadap kualitas SDM internal dapat dilakukan dengan pembekalan dan pembelajaran terhadap sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik juga memiliki empat orang orang *programer* sebagai tim kreatif dengan sistem kontrak. Tim ini bertugas membuat beragam inovasi dan pengembangan berbagai aplikasi khususnya yang memudahkan Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik dalam menjalankan tugas dan peningkatan kinerja bersama. Dengan demikian ketersediaan sumber daya manusia menjadi daya dukung yang sangat baik bagi terlaksananya perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan.

### **Ketersediaan Perangkat**

Sarana fasilitas pendukung Sistem Pendataan dan Pelaporan kegiatan pembangunan berbasis *website* tentunya harus didukung oleh ketersediaan server. Sesuai hasil observasi, Bagian Administrasi Pembangunan dan Data elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sudah memiliki 4 unit server. Untuk kegiatan sehari-harinya, server ini digunakan dalam proses pelelangan. Sistem yang digunakan adalah SPSE

atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik, namun masih mencukupi untuk *mengcover* sistem yang tengah direncanakan saat ini, yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan. Ketersediaan server tersebut tentunya akan meniadakan biaya penambahan server.

### **Ketersediaan Anggaran**

Penganggaran pengadaan aplikasi sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Ketersediaan anggaran diupayakan agar perencanaan sistem ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Untuk metode pengadaan aplikasi harus dipilih saat perencanaan pengadaan.

### **Fasilitas dalam Aplikasi**

Penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi sistem, sudah seharusnya memberikan kemudahan bagi petugas dan pengguna untuk menjalankannya. Fasilitas dalam aplikasi sistem pendataan dan pelaporan yang nantinya akan dikembangkan harus memberikan kemudahan dalam tampilannya. Sebagai proteksi awal, diperlukan fasilitas login untuk membatasi hak akses. Selanjutnya, konten dalam aplikasi harus dapat memberikan informasi bagi pengguna.

### **SIMPULAN**

Sistem Pendataan dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang berbasis aplikasi *online* sangat penting untuk diimplementasikan agar kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru dapat berjalan optimal. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan agar dapat terimplementasi dengan baik. Perencanaan pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan terdiri atas empat tahapan perencanaan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi rencana. Sementara itu

faktor-faktor penghambat perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan yaitu ketiadaan peraturan, pengawasan belum efektif, kurangnya komitmen, sumber daya manusia yang lemah, mutasi jabatan dan masalah jangka waktu. Faktor yang cukup menghambat dalam perencanaan sistem ini adalah sumber daya manusia. Interaksi antara teknologi dan sumber daya manusia harus didukung oleh penguasaan terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri. Agar perencanaan sistem pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan tidak lagi menemukan hambatan dikemudian hari, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: penguatan *leadership* disemua level jabatan, melaksanakan pelatihan dalam upaya mening-

katkan kapasitas dan kemampuan pegawai yang cakap terhadap pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan kesadaran secara terpadu dan menyeluruh tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai *smart city*.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Robert, R. D and Robert, T.M. 1984. *Planning and ecology*. Softcover reprint of the original 1st ed. 1984 Edition. Hardcover.
- Siagian, Sondang. 1994. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga: Jakarta.